


# **LAPORAN**



## **HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

**Januari – Maret**

**TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB I</b> .....                                   | 1  |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                             | 1  |
| A. Latar Belakang .....                              | 1  |
| B. Tujuan .....                                      | 2  |
| C. Sasaran .....                                     | 2  |
| D. Landasan Hukum .....                              | 2  |
| E. Rencana Kerja .....                               | 3  |
| <b>BAB II</b> .....                                  | 4  |
| <b>METODOLOGI</b> .....                              | 4  |
| A. Metode Penelitian .....                           | 4  |
| B. Populasi Dan Sampel .....                         | 4  |
| C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....         | 4  |
| D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control ..... | 4  |
| E. Teknik Analisis Data .....                        | 4  |
| F. Tahapan Pelaksanaan .....                         | 5  |
| <b>BAB III</b> .....                                 | 7  |
| <b>INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI</b> .....            | 7  |
| A. Profil Responden .....                            | 7  |
| 1. Tingkat Pendidikan Responden .....                | 7  |
| 2. Pekerjaan Responden .....                         | 7  |
| 3. Kelompok Usia Responden .....                     | 8  |
| 4. Jenis Layanan Responden .....                     | 9  |
| B. Indeks Persepsi Anti Korupsi Perindikator .....   | 9  |
| 1. Indikator Manipulasi Peraturan .....              | 9  |
| 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....            | 10 |
| 3. Indikator Menjual Pengaruh .....                  | 11 |
| 4. Indikator Transaksi Biaya .....                   | 12 |
| 5. Indikator Biaya Tambahan .....                    | 13 |
| 6. Indikator Hadiah .....                            | 14 |
| 7. Indikator Transparansi Biaya .....                | 15 |

|   |    |
|---|----|
| 8. Indikator Percaloan .....                                      | 16 |
| 9. Indikator Perbuatan Curang .....                               | 17 |
| 10. Indikator Transaksi Rahasia .....                             | 18 |
| C. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak ..... | 19 |
| <b>BAB IV</b> .....   | 21 |
| <b>PENUTUP</b> .....  | 21 |
| A. Kesimpulan .....   | 21 |
| B. Rekomendasi .....  | 21 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **B. Tujuan**

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai bahan untuk peningkatan kualitas pelayanan menuju **Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**.

## **C. Sasaran**

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan system, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

## **D. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

## **E. Rencana Kerja**

### **1. Persiapan dan Pengumpulan data**

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan jadwal pelaksanaan survei melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dengan jawaban yang tersedia.
- Pelaksanaan survei melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dengan jawaban yang tersedia.
- Penetapan Responden adalah pengguna layanan Pengadilan Negeri Pontianak.
- Pengumpulan data terhadap 10 unsur pertanyaan, berupa jawaban melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER).

### **2. Pelaksanaan Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam satu tahun, survei persepsi anti korupsi ini dilaksanakan dalam interval waktu bulan Januari 2022 sampai bulan Maret 2022.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **B. Populasi Dan Sampel**

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan di satuan serja Pengadilan Negeri Pontianak. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pengguna layanan dari satuan kerja Pengadilan Negeri Pontianak yang digunakan sebagai sumber data.

#### **C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat terjadinya suatu peristiwa berupa pemberian layanan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pontianak.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data pada penelitian ini diambil menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dengan populasi pada penelitian ini jumlah total keseluruhan sebanyak 317 orang responden.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling

rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi, yang menjadi mutu pelayanan Pengadilan Negeri Pontianak.

Skala indeks persepsi korupsi tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

#### F. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Model alur penyusunan**  
**Survei Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**  
**Ruang lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi**

| No | Ruang lingkup          |
|----|------------------------|
| 1  | Manipulasi Peraturan   |
| 2  | Penyalahgunaan Jabatan |
| 3  | Menjual Pengaruh       |
| 4  | Transaksi Biaya        |
| 5  | Biaya Tambahan         |
| 6  | Hadiah                 |
| 7  | Transparansi Biaya     |
| 8  | Percaloan              |
| 9  | Perbuatan Curang       |
| 10 | Transaksi Rahasia      |

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi IPAK | Mutu | Kinerja                    |
|----------------|----------------|------------------------------|------|----------------------------|
| 1              | 1.00 – 1.75    | 25 - 43.75                   | 1    | Tidak bersih dari korupsi  |
| 2              | 1.76 – 2.50    | 43.76 – 62.50                | 2    | Kurang bersih dari korupsi |
| 3              | 2.51 – 3.25    | 62.51 – 81.25                | 3    | Cukup bersih dari korupsi  |
| 4              | 3.26 – 4.00    | 81.26 – 100.00               | 4    | Bersih dari korupsi        |

## BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

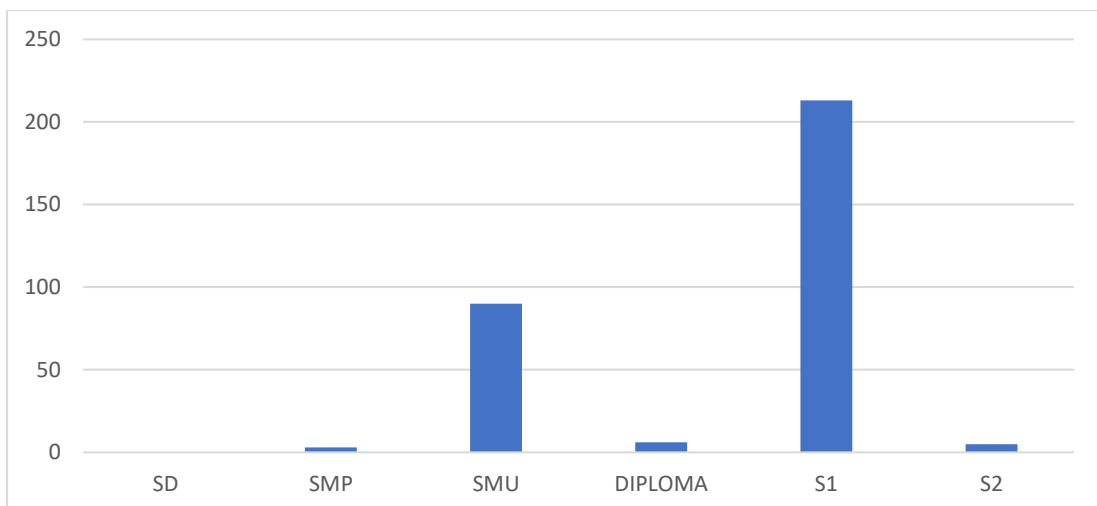
### A. Profil Responden

#### 1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pontianak sebanyak 213 orang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1), sebanyak 5 orang Pasca Sarjana (S2), sebanyak 6 orang Diploma, sebanyak 90 orang SMU dan sebanyak 3 orang SMP. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

**Tingkat Pendidikan Responden**

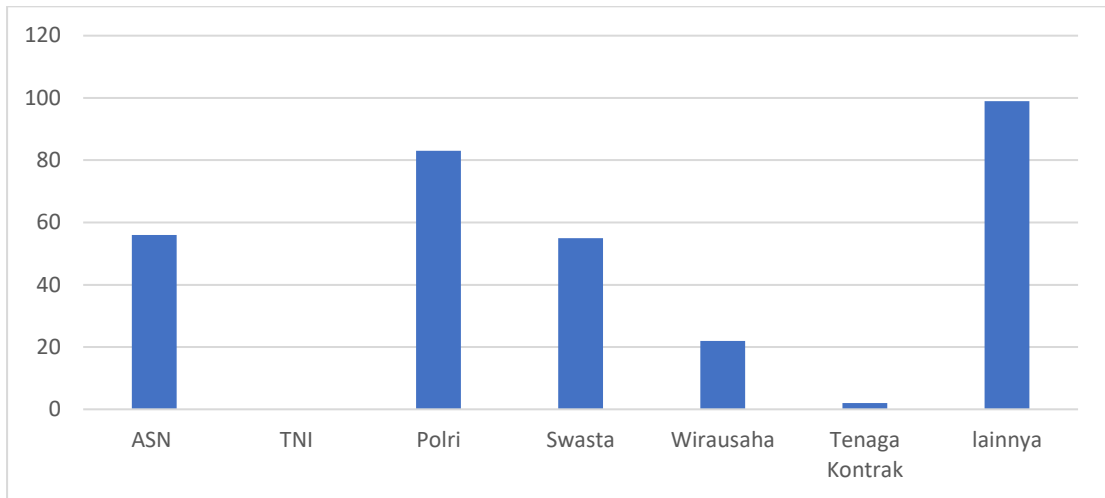


Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

#### 2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Pontianak, sebanyak 56 orang responden memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, sebanyak 83 orang pekerjaan sebagai Polri, sebanyak 55 orang pekerjaan swasta, sebanyak 22 orang pekerjaan wirausaha, sebanyak 2 orang tenaga kontrak dan sebanyak 99 orang pekerjaan lainnya. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2  
**Jenis Pekerjaan Responden**

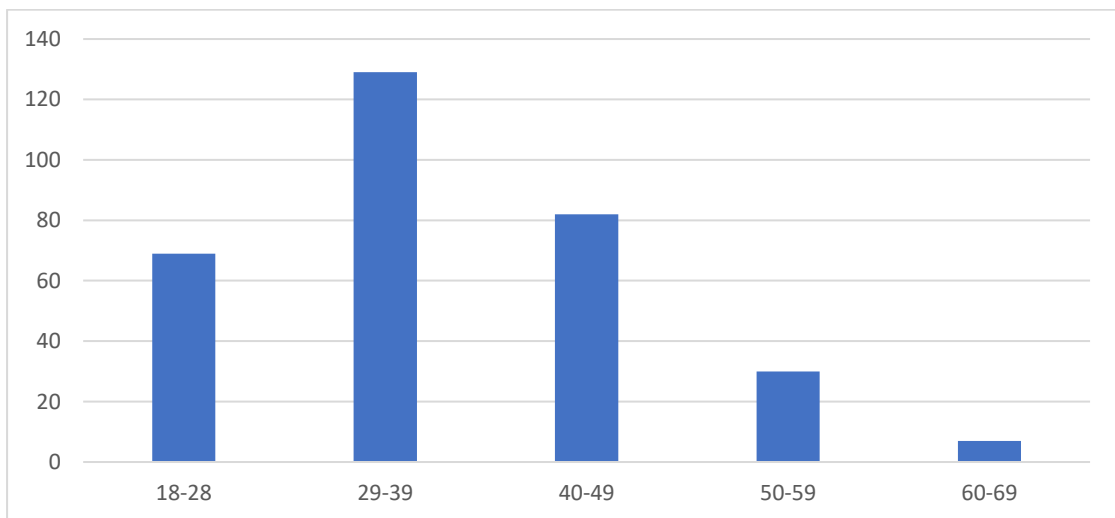


Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

### 3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 29 tahun sampai dengan 39 tahun. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3  
**Jenis Usia Responden**



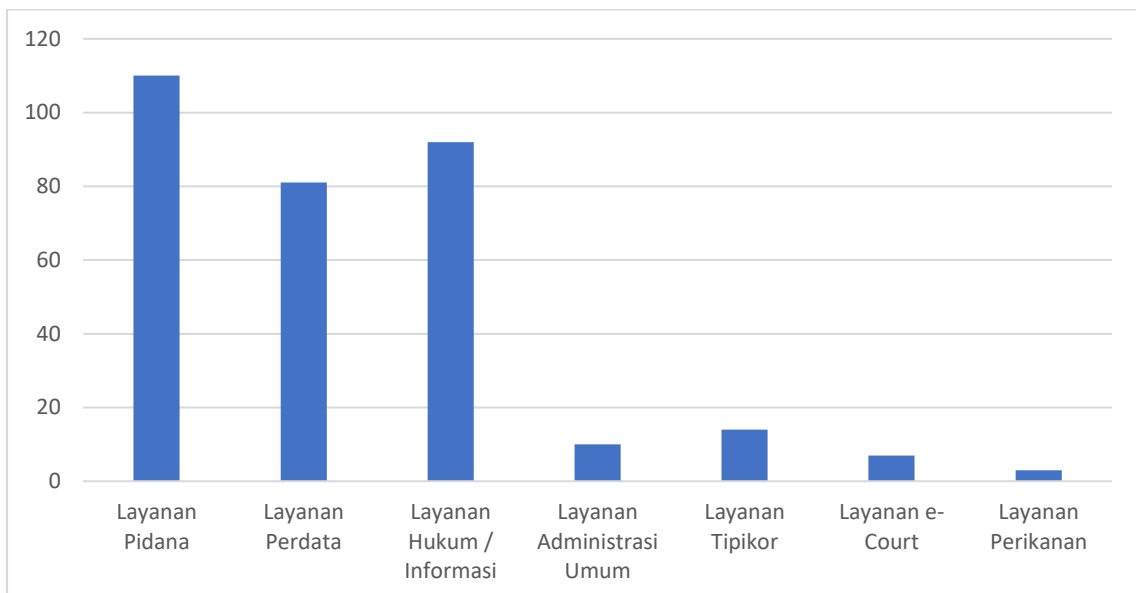
Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

#### 4. Jenis Layanan Responden

Layanan PTSP terbagi menjadi 7 (tujuh) jenis layanan, sebanyak 110 orang responden menerima layanan Pidana, sebanyak 81 orang responden menerima layanan Perdata, sebanyak 92 orang responden menerima layanan Hukum/Informasi, sebanyak 10 orang responden menerima layanan Administasi Umum, sebanyak 14 orang responden menerima layanan Tipikor, sebanyak 7 orang responden menerima layanan e-Court, sebanyak 3 orang responden menerima layanan Perikanan. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4

#### Jenis Layanan Responden



Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

### B. Indeks Persepsi Anti Korupsi Perindikator

#### 1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3,994**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 1

**Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan**

| Nomor  | Jawaban                | Skor | Frekuensi |       |
|--------|------------------------|------|-----------|-------|
|        |                        |      | f         | %     |
| 1      | Tidak sesuai prosedur  | 1    | 0         | 0     |
| 2      | Jarang sesuai prosedur | 2    | 0         | 0     |
| 3      | Sering sesuai prosedur | 3    | 2         | 0,63  |
| 4      | Selalu sesuai prosedur | 4    | 315       | 99,37 |
| Jumlah |                        |      | 317       | 100   |

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 1

**Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan**



**2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 2

**Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan**

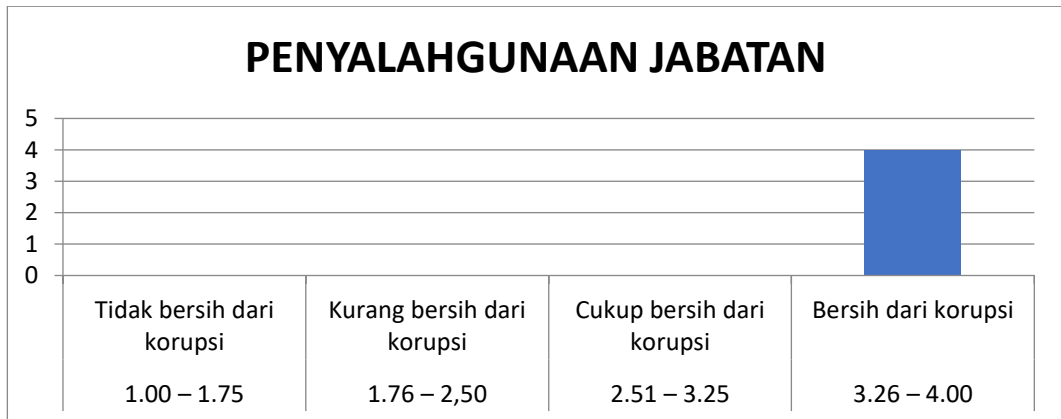
| Nomor  | Jawaban                                 | Skor | Frekuensi |     |
|--------|---|------|-----------|-----|
|        |   |      | f         | %   |
| 1      | Petugas melayani selalu meminta imbalan | 1    | 0         | 0   |
| 2      | Petugas melayani sering meminta imbalan | 2    | 0         | 0   |
| 3      | Petugas melayani jarang meminta imbalan | 3    | 0         | 0   |
| 4      | Petugas melayani tanpa meminta imbalan  | 4    | 317       | 100 |
| Jumlah |   |      | 317       | 100 |

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 2

**Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan**



**3. Indikator Menjual Pengaruh**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari pengaruh pengurusan surat/berkas perkara.

Tabel 3

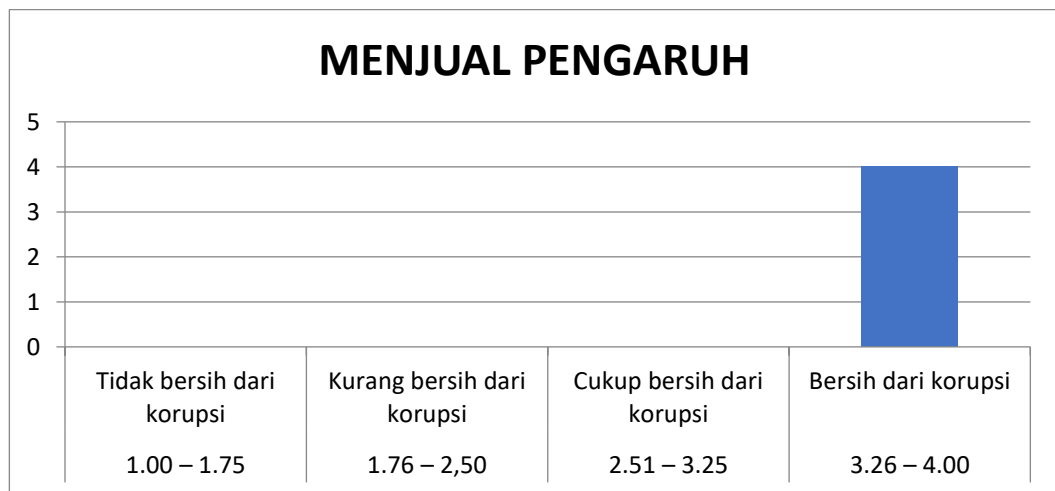
**Indeks pada indikator Menjual Pengaruh**

| Nomor  | Jawaban   | Skor | Frekuensi |     |
|--------|-----------|------|-----------|-----|
|        |           |      | f         | %   |
| 1      | Selalu    | 1    | 0         | 0   |
| 2      | Sering    | 2    | 0         | 0   |
| 3      | Jarang    | 3    | 0         | 0   |
| 4      | Tidak ada | 4    | 317       | 100 |
| Jumlah |           |      | 317       | 100 |

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 3

**Indeks pada indikator Menjual Pengaruh**



**4. Indikator Transaksi Biaya**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,997**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Korupsi dalam hal Transaksi Biaya.

Tabel 4

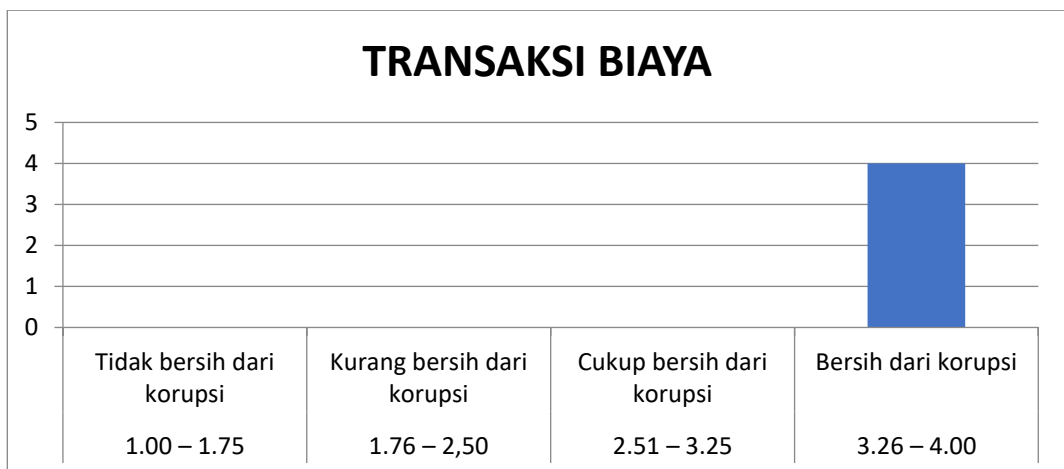
**Indeks pada indikator Transaksi Biaya**

| Nomor  | Jawaban      | Skor | Frekuensi |       |
|--------|--------------|------|-----------|-------|
|        |              |      | f         | %     |
| 1      | Tidak Pernah | 1    | 0         | 0     |
| 2      | Jarang       | 2    | 0         | 0     |
| 3      | Sering       | 3    | 1         | 0,32  |
| 4      | Selalu       | 4    | 316       | 99,68 |
| Jumlah |              |      | 317       | 100   |

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 4

**Indeks pada indikator Transaksi Biaya**



**5. Indikator Biaya Tambahan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,991**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 5

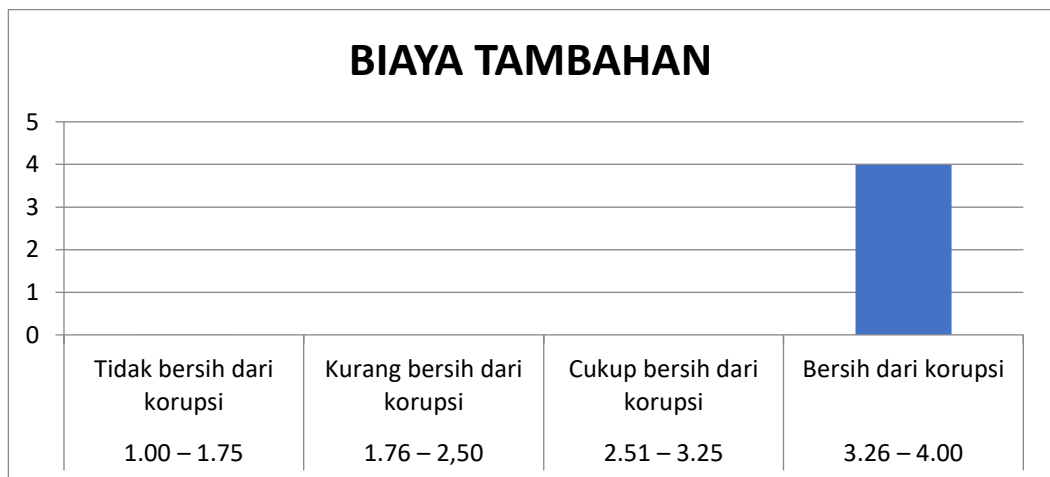
**Indeks pada indikator Biaya Tambahan**

| Nomor  | Jawaban      | Skor | Frekuensi |       |
|--------|--------------|------|-----------|-------|
|        |              |      | f         | %     |
| 1      | Tidak Pernah | 1    | 1         | 0,32  |
| 2      | Jarang       | 2    | 0         | 0     |
| 3      | Sering       | 3    | 0         | 0     |
| 4      | Selalu       | 4    | 316       | 99,68 |
| Jumlah |              |      | 317       | 100   |

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 5

**Indeks pada indikator Biaya Tambahan**



**6. Indikator Hadiah**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari penerimaan Hadiah.

Tabel 6

**Indeks pada indikator Hadiah**

| Nomor  | Jawaban   | Skor | Frekuensi |     |
|--------|-----------|------|-----------|-----|
|        |           |      | f         | %   |
| 1      | Selalu    | 1    | 0         | 0   |
| 2      | Sering    | 2    | 0         | 0   |
| 3      | Jarang    | 3    | 0         | 0   |
| 4      | Tidak ada | 4    | 317       | 100 |
| Jumlah |           |      | 317       | 100 |

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 6

**Indeks pada indikator Hadiah**



**7. Indikator Transparansi Biaya**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari korupsi dalam memberikan Transparansi Biaya.

Tabel 7

**Indeks pada indikator Transparansi Biaya**

| Nomor  | Jawaban      | Skor | Frekuensi |     |
|--------|--------------|------|-----------|-----|
|        |              |      | f         | %   |
| 1      | Tidak Pernah | 1    | 0         | 0   |
| 2      | Jarang       | 2    | 0         | 0   |
| 3      | Sering       | 3    | 0         | 0   |
| 4      | Selalu       | 4    | 317       | 100 |
| Jumlah |              |      | 317       | 100 |

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 7

**Indeks pada indikator Transparansi Biaya**



**8. Indikator Percaloan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,991**.

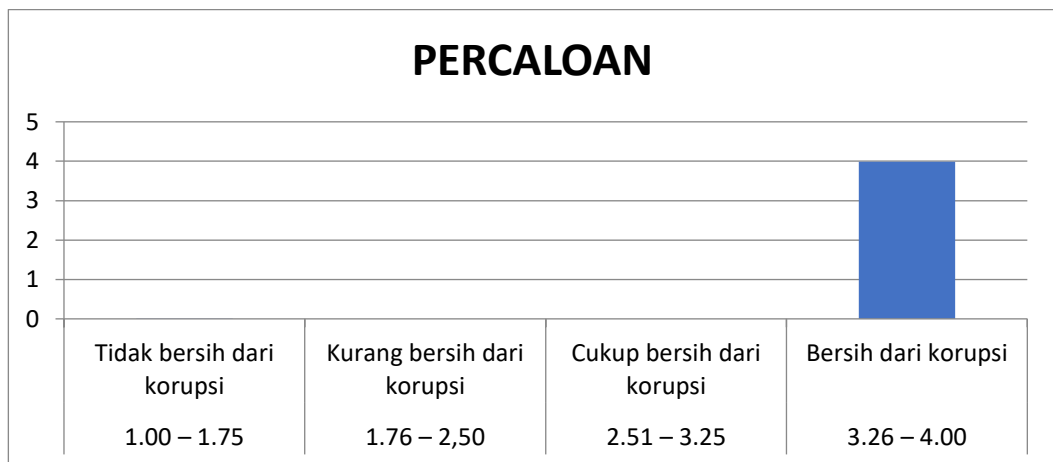
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 8  
**Indeks pada indikator Percaloan**

| Nomor  | Jawaban   | Skor | Frekuensi |       |
|--------|-----------|------|-----------|-------|
|        |           |      | f         | %     |
| 1      | Selalu    | 1    | 1         | 0,32  |
| 2      | Sering    | 2    | 0         | 0     |
| 3      | Jarang    | 3    | 0         | 0     |
| 4      | Tidak Ada | 4    | 316       | 99,68 |
| Jumlah |           |      | 317       | 100   |

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 8  
**Indeks pada indikator Percaloan**



### 9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 9

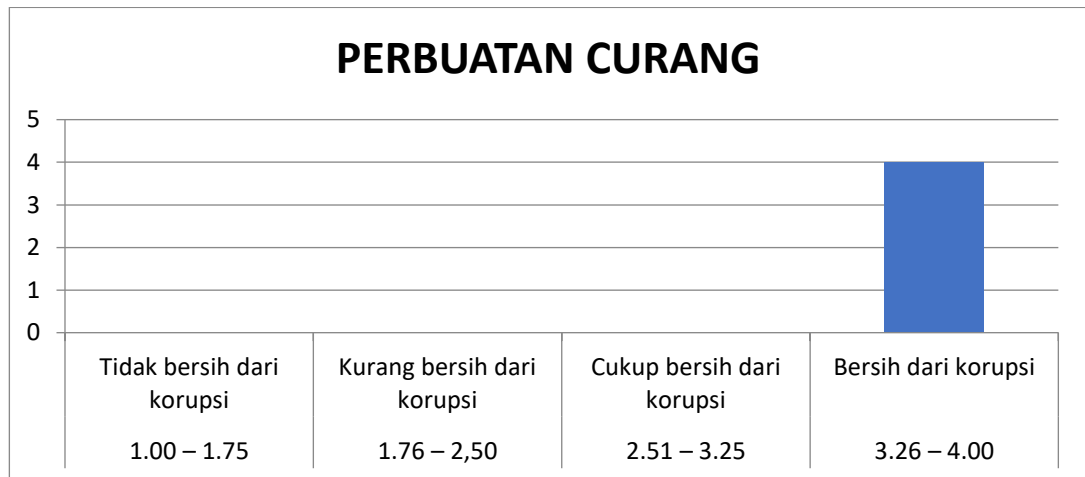
**Indeks pada indikator Perbuatan Curang**

| Nomor  | Jawaban   | Skor | Frekuensi |     |
|--------|-----------|------|-----------|-----|
|        |           |      | f         | %   |
| 1      | Selalu    | 1    | 0         | 0   |
| 2      | Sering    | 2    | 0         | 0   |
| 3      | Jarang    | 3    | 0         | 0   |
| 4      | Tidak ada | 4    | 317       | 100 |
| Jumlah |           |      | 317       | 100 |

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 9

**Indeks pada indikator Perbuatan Curang**



**10. Indikator Transaksi Rahasia**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pengadilan Negeri Pontianak Bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 10

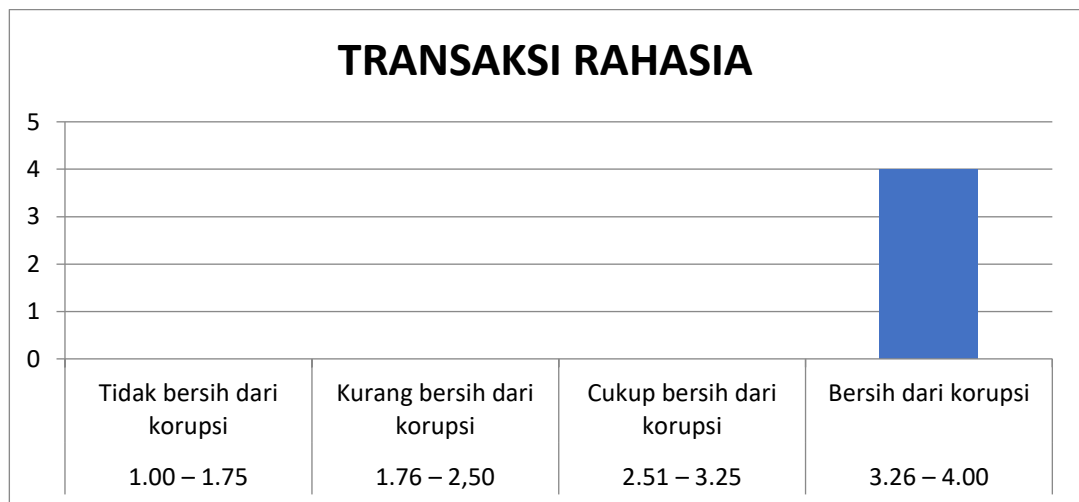
**Indeks pada indikator Transaksi Rahasia**

| Nomor  | Jawaban   | Skor | Frekuensi |     |
|--------|-----------|------|-----------|-----|
|        |           |      | f         | %   |
| 1      | Selalu    | 1    | 0         | 0   |
| 2      | Sering    | 2    | 0         | 0   |
| 3      | Jarang    | 3    | 0         | 0   |
| 4      | Tidak ada | 4    | 317       | 100 |
| Jumlah |           |      | 317       | 100 |

Sumber Data: aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SiSUPER)  
 Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 10

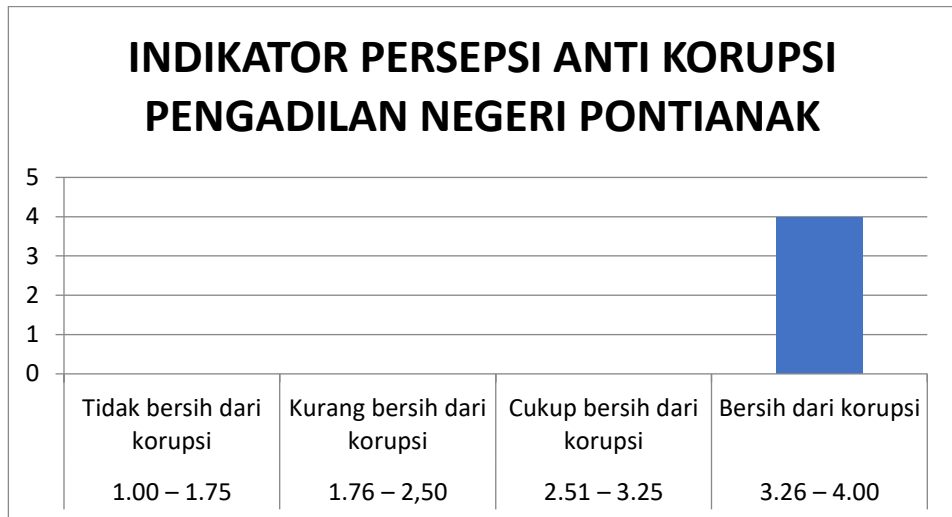
**Tabel indeks pada indikator Transaksi Rahasia**



**C. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pontianak sebesar **4/99,93**.

Tabel 11  
**Indeks Persepsi Anti Korupsi**  
**Pengadilan Negeri Pontianak**



Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **81.26 – 100.00**.

Tabel 12  
**Indek Persepsi Anti Korupsi**  
**Pengadilan Negeri Pontianak**

| Nilai Persepsi | Nilai Interval     | Nilai Interval Konversi IPAK | Mutu     | Kinerja                    |
|----------------|--------------------|------------------------------|----------|----------------------------|
| 1              | 1.00 – 1.75        | 25 - 43.75                   | 1        | Tidak bersih dari korupsi  |
| 2              | 1.76 – 2.50        | 43.76 – 62.50                | 2        | Kurang bersih dari korupsi |
| 3              | 2.51 – 3.25        | 62.51 – 81.25                | 3        | Cukup bersih dari korupsi  |
| 4              | <b>3.26 – 4.00</b> | <b>81.26 – 100.00</b>        | <b>4</b> | <b>Bersih dari korupsi</b> |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Pontianak diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pontianak memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **4/99,93** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,994**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **4**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **4**
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,997**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,991**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **4**
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **4**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,991**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **4**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4**

#### **B. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pontianak bulan Januari 2022 sampai bulan Maret 2022 tersebut, menunjukkan mayoritas indikator memiliki indeks **4,00** atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator Biaya Tambahan dan Percaloan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Perlu adanya perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta komitmen Pengadilan Negeri Pontianak untuk menuju **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**.